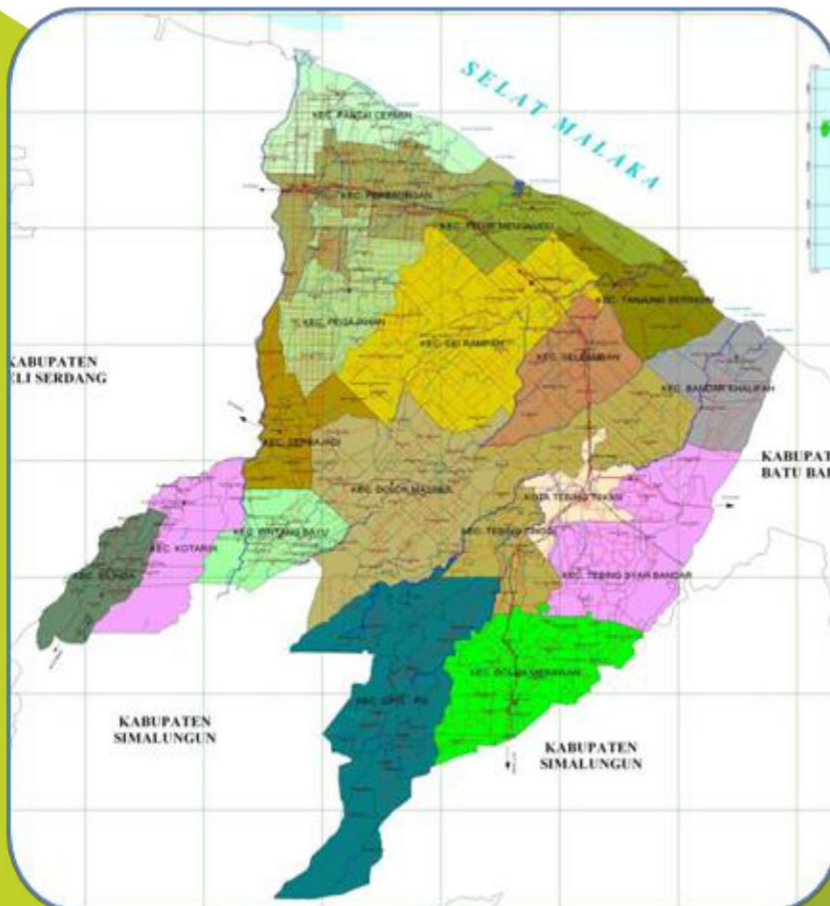




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2021-2026



POTENSI



PERTANIAN



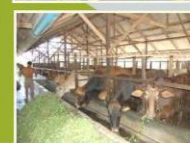
PARIWISATA



PERIKANAN



PERKEBUNAN



PETERNAKAN



PERINDUSTRIAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

2023



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan dokumen Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan
38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah
41. Kecamatan Tebing Syahbandar

42. Kecamatan Sei Bamban
43. Kecamatan Pegajahan
44. Kecamatan Serbajadi
45. Kecamatan Bintang Bayu
46. Kecamatan Silinda

3. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN;
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
BAB VIII : PENUTUP.
 - (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 69

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan BAPPEDALITBANG dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Sei Rampah, Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



RUSMIANI PURBA, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	16
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah	16
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Bappedalitbang	18
2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.5 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappelitbang Provinsi.....	42
3.3.1 Telaahan Renstra Bappenas.....	42
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	44
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	46

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	107
BAB VIII PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2023	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2023	17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	18
Tabel 2.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022	19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	21
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappedalitbang Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai	41
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Renstra Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Kebersihan Penanganannya	42
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Renstra Bappedalitbang Provinsi Sumatera Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	43
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..	55
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan.....	67
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	70
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	108

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	15
Gambar 4.1	Logical Framework Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	57
Gambar 4.2	Pohon Masalah Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Sebelum Perubahan	58
Gambar 4.3	Cascading Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Sesudah Perubahan	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Dalam menyusun Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan perubahan renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir perubahan renstra perangkat daerah, hingga penetapan perubahan renstra perangkat daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, tanggal 22 Desember 2023;
25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang bedagai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan program rencana pembangunan daerah kabupaten;
 - b. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota;
 - c. Perumusan konsep kebijakan bupati dan petunjuk teknis perencanaan serta kebijakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- f. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- h. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- k. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- l. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- m. Memberikan masukan kepada bupati dan sekretaris daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada bupati dan sekretaris daerah; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud, Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. kepala badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

- e. bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan
- f. bidang penelitian dan pengembangan g. unit pelaksana teknis badan
- h. kelompok jabatan fungsional

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (3) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Uraian Tugas :

- (1) **Kepala Badan**, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- (1) **Sekretariat**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi
- a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - c. pengoordinasian program penunjang urusan pemerintah daerah, meliputi kegiatan:
 - 1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
 - 2. administrasi keuangan Badan;
 - 3. administrasi barang milik daerah pada Badan;
 - 4. administrasi kepegawaian Badan;
 - 5. administrasi umum Badan;
 - 6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 8. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.
- (1) **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (1) **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

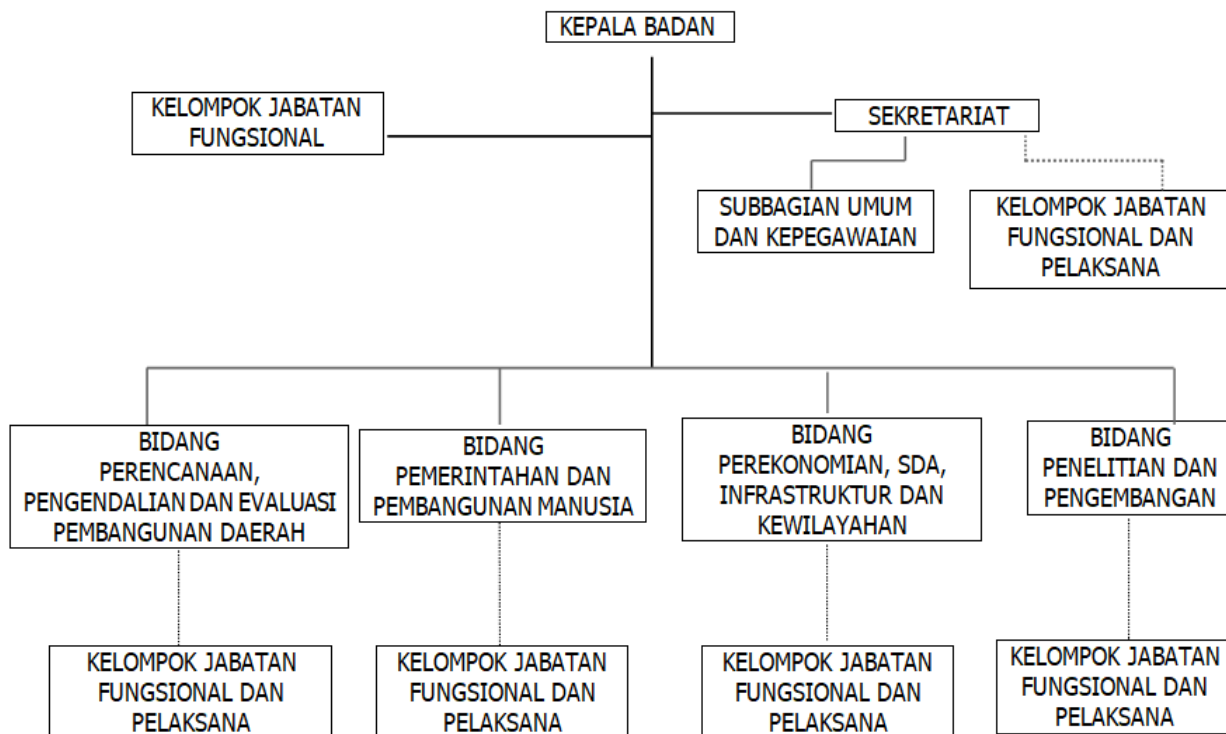
- (1) **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
 1. perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 2. perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (1) **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pengkoordinasian program penelitian dan pengembangan daerah, meliputi kegiatan:
 - 1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

Gambar: 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**



2.2 Sumber Daya Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai

Pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Perangkat Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan

masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sumber daya manusia yakni aparatur sipil Negara (ASN) yang bekerja di Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah sebanyak 47 orang (PNS dan Tenaga Honor), sebagaimana disajikan pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2023

No.	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Pejabat Fungsional	17
6.	Pelaksana/Staf	
	- Pelaksana/Staf PNS	8
	- Tenaga Honor	17
JUMLAH.....		47

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2023

No.	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	24
3.	Golongan II	-
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Honor	17
JUMLAH.....		47

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	10
2.	Sarjana (S1)	19
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	SLTA	1
5.	SLTP	-
6.	SD	-
JUMLAH.....		30

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Bappedalitbang

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappedalitbang (per Desember 2022) pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappedalitbang telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas satu lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang rapat/pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi Wifi dan CCTV dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas mungkin ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan komputer dan printer.

Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappedalitbang memperoleh beberapa kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua). Data seluruh aset yang dimiliki Bappedalitbang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
**Fasilitas Sarana dan Prasarana Operasional Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2023**



No	URAIAN	JUMLAH (Unit)	KONDISI
1.	Kendaraan Roda 4	5	BAIK
2.	Sepeda Motor	7	BAIK
3.	Pesawat Telepone	1	BAIK
4.	Facximile	1	BAIK
5.	Komputer PC	27	BAIK
6.	Komputer Note Book	40	BAIK
7.	Printer	29	BAIK
8.	CCTV	10 <i>Cam</i>	BAIK
9.	Scanner	6	BAIK
10.	Server dan Wireless	1	BAIK
11.	Camera Digital	5	BAIK
12.	Televisi	2	BAIK
13.	Peralatan Sound System	2	BAIK
14.	AC (Pendingin Udara)	15	BAIK
15.	Jam Dinding	5	BAIK
16.	Mesin Ketik Manual	1	BAIK
17.	Meja Kerja	36	BAIK
18.	Kursi Kerja	76	BAIK
19.	Lemari/Rak Arsip	8	BAIK
20.	Filling Kabinet	17	BAIK
21.	White Board	6	BAIK
22.	Meja Kursi Tamu	1	BAIK
23.	Kursi Hadap	40	BAIK
24.	GPS	3	BAIK
26.	Mesin Foto Copy	3	BAIK
27.	Sumur dengan Pompa	1	BAIK
28.	Mesin Potong Rumput	1	BAIK
30.	infocus	2	BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai tugas sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasi penyusunan program pembangunan daerah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai periode 2021-2026.

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, Konsultasi, dan Koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Urusan Penelitian dan Pengembangan.



Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan BappedalitabngKabupaten Serdang Bedagai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD																		
	PERENCANAAN																		
a.	Tingkat keselarasan Tujuan, Sasaran, Target dan Program Prioritas :																		
	RKPD terhadap RPJMD				90%	92%	97%	-	-	94%	97%	97%	-	-	104%	105%	100%	-	-
	Renstra terhadap RPJMD				90%	92%	97%	-	-	97%	89%	97%	-	-	108%	97%	100%	-	-
	Renja terhadap RKPD				90%	92%	97%	-	-	100%	100%	97%	-	-	111%	109%	100%	-	-
	Renja terhadap Renstra				90%	92%	97%	-	-	94%	99%	97%	-	-	104%	108%	100%	-	-
b.	Persentase OPD yang capaian kinerja sesuai dengan rencana				90%	95%	97%	-	-	108%	99%	97%	-	-	120%	104%	100%	-	-
c.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW				45%	-	-	-	-	33%	-	-	-	-	73%	-	-	-	-
d.	Nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP				-	-	-	24	25	-	-	-	23,16	23,18					



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
e.	Presentase Keselarasan Sasaran Program : a. Renja dengan RKPD b. RPJMD dengan Renstra c. Renstra dengan Renja d. RPJMD dengan RKPD				-	-	-	100 %	100%	-	-	-	100%	100%					
f.	Persentase Rata-rata capaian kinerja utama pemerintah daerah				-	-	-	80%	82%	-	-	-	70,55%	50%					
g.	Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah				-	-	-	80%	82%	-	-	-	71,07%	71,60%					
h.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	-	-	75	76	-	-	-	73	74					
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
i	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah				-	-	-	85%	90%	-	-	-	60%	90%					
2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD																		
	PERENCANAAN																		
a.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan kabupaten terhadap dokumen perencanaan OPD :																		
	RPJMD dengan Renstra				90%	92%	97%	-	-	97%	89%	97%	-	-	108%	97%	100%	-	-



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	RPJMD dengan RKPD				90%	92%	97%	-	-	94%	97%	97%	-	-	104%	105%	100%	-	-
	RKPD dengan Renja				90%	92%	97%	-	-	100%	100%	97%	-	-	111%	109%	100%	-	-
b.	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan				89%	90%	92%	-	-	88%	82%	55%	-	-	99%	91%	60%	-	-
c.	Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang diterapkan				100%	100%	100%	-	-	88%	100%	100%	-	-	88%	100%	100%	-	-
d.	Persentase hasil kajian bidang sosial budaya/SDM yang diterapkan				100%	100%	100%	-	-	90%	100%	100%	-	-	90%	100%	100%	-	-
e.	Persentase hasil kajian bidang prasarana wilayah yang diterapkan				100%	100%	100%	-	-	90%	86%	100%	-	-	90%	86%	100%	-	-
f.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	-	-	BB	BB	-	-	-	B	A	-	-	-	90%	100%
g.	Persentase Rekomendasi Hasil Monev. yang ditindaklanjuti				-	-	-	100 %	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
h.	Persentase Kinerja RPJMD Yang tercapai				-	-	-	100 %	100%	-	-	-	70,81%	60%	-	-	-	70,81 %	60%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target t NSPK	Target t IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
i.	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah				-	-	-	85%	90%	-	-	-	60%	90%	-	-	-	71%	100%

Jika dilihat tren selama 2 (dua) tahun terakhir, Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi anggaran dengan tren meningkat yakni dari sebesar Rp. 6.080.273.030,- di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 8.955.629.983,- di tahun 2022. Dengan belanja tidak langsung sebanyak Rp. 4.588.813.130,- di tahun 2021 menjadi sebanyak Rp. 5.004.870.596,- di tahun 2022. dan belanja langsung sebanyak Rp. 1.491.459.900,- di tahun 2021 menjadi sebanyak Rp. 3.950.759.387,- di tahun 2022. Atau dengan kata lain, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 65,77%.

Dengan besaran anggaran tersebut, program-program yang dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Urusan Perencanaan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Urusan Penelitian dan Pengembangan:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dari sisi anggaran, Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2018-2022 beserta serapannya sebagai tabel berikut:



Tabel 2.6
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappedalitbang
Kabupaten Serdang Bedagai**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.899.446.262,36	4.025.026.800,84	4.249.720.521,00	4.588.813.130,00	5.004.870.596,00	3.476.803.793,00	3.762.091.268,00	4.056.084.338,00	4.410.611.130,00	4.823.671.707,00	89,16%	93,47%	95,44%	96,12%	96,38%	10,64%	13,41%
Belanja Pegawai	3.899.446.262,36	4.025.026.800,84	4.249.720.521,00	4.588.813.130,00	5.004.870.596,00	3.476.803.793,00	3.762.091.268,00	4.056.084.338,00	4.410.611.130,00	4.823.671.707,00	89,16%	93,47%	95,44%	96,12%	96,38%	10,64%	13,41%
BELANJA LANGSUNG	5.278.115.000,00	4.200.337.031,00	2.139.586.363,00	1.491.459.900,00	3.950.759.387,00	4.748.253.884,00	3.920.735.381,00	2.058.328.833,00	1.416.452.257,00	3.585.225.039,00	89,96%	93,34%	96,20%	94,97%	90,75%	(10,47%)	(3,57%)
Program Pelayanan Administrasi Pertanian	813.220.512,00	594.036.036,00	469.750.478,00	-	-	772.455.452,00	555.212.940,00	456.683.743,00	-	-	94,99%	93,46%	97,22%	-	-	(14,74%)	(6,03%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.190.000,00	737.394.755,00	425.178.941,00	-	-	253.768.908,00	692.293.788,00	379.105.770,00	-	-	74,82%	93,88%	89,16%	-	-	23,17%	39,73%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	181.000.000,00	44.774.750,00	-	-	-	176.621.584,00	43.426.180,00	-	-	-	97,58%	96,99%	-	-	-	28,23%	165,04%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	(10%)	16,67%
Program pengembangan data/informasi	430.425.000,00	632.977.155,00	237.273.000,00	-	-	404.583.770,00	551.523.509,00	235.473.000,00	-	-	94%	87,13%	99,24%	-	-	32,25%	36,93%
Program perencanaan pembangunan daerah	1.406.529.488,00	695.807.125,00	407.999.146,00	-	-	1.309.813.595,00	665.035.423,00	393.774.100,00	-	-	93,12%	95,58%	96,51%	-	-	(11,50%)	(5,07%)
Program perencanaan pembangunan ekonomi	111.800.000,00	297.521.788,00	118.117.004,00	-	-	92.304.200,00	265.065.010,00	115.822.500,00	-	-	82,56%	89,09%	98,06%	-	-	10,97%	16,37%
Program perencanaan sosial dan budaya	440.100.000,00	311.909.882,00	150.621.700,00	-	-	436.271.000,00	293.813.100,00	150.522.700,00	-	-	99,13%	94,2%	99,93%	-	-	(23,79%)	(19,68%)
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	541.150.000,00	885.915.540,00	330.646.094,00	-	-	532.535.499,00	854.365.431,00	326.947.020,00	-	-	98,41%	96,44%	98,88%	-	-	13,94%	19,18%
Program Penataan Ruang	1.010.700.000,00	-	-	-	-	765.899.876,00	-	-	-	-	75,78%	-	-	-	-	294,3%	258,37%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.338.608,00	-	-	-	-	9.259.000,00	-	-	-	-	99,15%	-	-
Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	-	-	-	11.680.800,00	20.000.000,00	-	-	-	11.540.800,00	15.000.000,00	-	-	-	98,8%	75%	71%	29,97%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	138.600.700,00	509.068.605,00	-	-	-	135.951.579,00	476.394.819,00	-	-	-	98,09%	93,58%	267%	250,41%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	35.000.000,00	532.982.500,00	-	-	-	34.000.000,00	511.430.500,00	-	-	-	97,14%	95,96%	1423%	1404,21%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	308.400.000,00	328.200.000,00	-	-	-	303.150.608,00	316.759.823,00	-	-	-	98,3%	96,51%	6%	4,49%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	213.840.000,00	662.090.200,00	-	-	-	171.385.170,00	582.091.955,00	-	-	-	80,15%	87,92%	210%	239,64%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	45.822.100,00	440.297.360,00	-	-	-	45.770.700,00	273.866.445,00	-	-	-	99,89%	62,20%	861%	498,34%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	310.628.300,00	405.374.400,00	-	-	-	290.170.300,00	395.886.283,00	-	-	-	93,41%	97,66%	31%	36,43%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	58.176.900,00	86.943.676,00	-	-	-	57.917.900,00	85.032.464,00	-	-	-	99,55%	97,8%	49%	46,82%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	132.549.600,00	375.698.600,00	-	-	-	131.531.600,00	366.396.671,00	-	-	-	99,23%	97,52%	183%	178,56%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	9.638.400,00	131.431.476,00	-	-	-	9.638.400,00	130.114.104,00	-	-	-	100%	99%	1264%	1249,96%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	100.865.200,00	123.417.700,00	-	-	-	99.873.200,00	107.330.960,00	-	-	-	99,02%	86,97%	22%	7,47%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	126.257.900,00	185.925.862,00	-	-	-	126.257.900,00	182.800.915,00	-	-	-	100,0%	98,32%	47%	44,78%

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya kegiatan pendampingan/desk intensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan
- 2) Terdapat keselarasan RPJMD dengan Renstra, RPJMD dengan RKPD, Renja dengan RKPD, dan Renstra dengan Renja
- 3) Penetapan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan sudah terukur
- 4) Memanfaatkan teknologi dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah

b. Kelemahan

- 1) Masih terdapat kesulitan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dengan alokasi penganggarnya
- 2) Kualitas dan kuantitas data masih kurang memadai
- 3) Hasil Monev masih terbatas pada DAK/TP dan belum menjawab permasalahan yang dihadapi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan
- 5) Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Tersedianya aplikasi perencanaan

- 2) Dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra, PK, RKPD dan Renja baik pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah
 - 3) Penetapan perencanaan tahunan sesuai dengan rencana perangkat daerah
 - 4) Adanya kerjasama dengan lembaga penelitian yang terdaftar
- b. Tantangan
- 1) Perangkat Daerah membuat kegiatan di luar dokumen perencanaan sebelumnya
 - 2) Masih terdapat rumusan strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil (outcome) sesuai dengan levelnya.
 - 3) Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja Kepala Daerah
 - 4) Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis TIK melalui SIPD

2.5.Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappedalitbang maupun lingkungan eksternal Bappedalitbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang berkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappedalitbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappedalitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
5. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan;
7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam bidang perencanaan masih menemui beberapa permasalahan dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai maka Kepala Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai memiliki fungsi untuk menyelenggarakan:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program rencana pembangunan daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota;

- c. Perumusan konsep kebijakan bupati dan petunjuk teknis perencanaan serta kebijakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- f. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- h. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- k. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- l. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- m. Memberikan masukan kepada bupati dan sekretaris daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada bupati dan sekretaris daerah; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten serdang bedagai di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan



Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif;
- b. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis TIK melalui SIPD;
- c. Belum optimalnya implementasi prinsip *Money Follow Program Prioritas* dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*));
- e. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan;
- f. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana;
- g. Rendahnya Persentase Rekomendasi Hasil Monev. yang ditindaklanjuti;
- h. Masih Rendahntya Kinerja RPJMD yang tercapai;
- i. Masih rendahnya nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP;
- j. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil kajian dan penelitian dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	- Belum optimalnya dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan standar dan berkualitas; - Belum terciptanya keselarasan antar dokumen perencanaan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, lincah, dan Kolaboratif	Pengawasan oleh Kemenpan RB, Inspektorat Prov./Kab	Belum optimalnya implementasi AKIP
Belum optimalnya penerapan perencanaan dan	Penggunaan system informasi/SIPDmasih rendah	Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-1.15-1317	Pengendalian dan evaluasi belum optimal	Pengawasan oleh Mendagri, BPK,	Penggunaan ITyang telah



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
penganggaran berbasis TIK melalui SIPD;		Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		BPKP dan KPK	terintegrasi
Belum optimalnya implementasi prinsip <i>Money Follow Programe Priority</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Mewujudkan perencanaan yang berorientasi hasil (Outcome)	Pengawasan oleh Inspektorat Prov./Kab	1. Menyusun tata cara pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan; 2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.
Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (<i>Performance Based Budgeting</i>)	Implementasi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih rendah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)	Pengawasan oleh Mendagri, Kemenkeu	Optimalisasi system informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Konsistensi antar perencanaan masih rendah	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; - Peraturan Menteri	Menjamin pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala	Pengawasan oleh BPK, BPKP dan KPK	Kepatuhan terhadap mekanisme pengendalian dan evaluasi dokumen



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD			perencanaan
Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana	SDM Aparatur Perencana Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil 	Sumberdaya aparatur perencana di Perangkat Daerah	Diklat dari Pusbindiklatren Bappenas dan lembaga pelatihan lainnya	1. Meningkatkan kapabilitas SDM perencana 2. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan
Rendahnya Persentase Rekomendasi Hasil Monev. yang ditindaklanjuti	Monev. telah dilakukan setiap triwulan namun tidak menyajikan permasalahan dan saran-saran perbaikan pencapaian target yang telah diperjanjikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 	Capaian kinerja merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada dokumen perencanaan tahun sebelumnya	Pengawasan oleh Kemendagri dan Kemenkeu	Melengkapi evaluasi yang dilakukan dengan penyajian data hambatan/per masalahan yang menghambat pencapaian kinerja dan menyajikan saran-saran perbaikan untuk



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					peningkatan kinerja
Masih Rendahnya Kinerja RPJMD yang tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas data masih kurang memadai; - Implementasi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 	Agar adanya konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah, antara pusat dan daerah	Pengawasan oleh Kemendagri dan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu keselarasan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya; - Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan
Masih rendahnya nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP	Terdapat kesulitan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan alokasi penganggarnya Kualitas dan kuantitas data masih kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 	Capaian kinerja merupakan hasil dari pendampingan/desk intensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan serta di dukung dengan penggunaan aplikasi perencanaan.	Pengawasan oleh Kemendagri dan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi	Memanfaatkan Aplikasi e-SAKIP secara maksimal baik dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta memaksimalkan penggunaannya untuk pemantauan dan evaluasi serta sarana penyampaian



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					bagi stakeholder terkait
Masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil kajian dan penelitian dalam pembangunan daerah	Rendahnya Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi. Daerah - Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian; 	Melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian yang terdaftar	Lembaga /Instansi yang akan melakukan penelitian, riset, karya ilmiah dan kerjasama penelitian	Pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, lincah, dan Kolaboratif	Belum optimalnya implementasi AKIP
2.	Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis TIK melalui SIPD;	Penggunaan system informasi/SIPD masih rendah	Pengendalian dan evaluasi belum optimal
3.	Belum optimalnya implementasi prinsip <i>Money Follow Programe Priority</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan	Belum optimalnya perencanaan yang berorientasi hasil (Outcome)
4.	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (<i>Performance Based Budgeting</i>)	Implementasi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih rendah	Belum optimalnya Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)
5.	Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Konsistensi antar dokumen perencanaan masih rendah	Masih rendahnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala
6.	Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana	SDM Aparatur Perencana Masih Rendah	Masih rendahnya Sumberdaya aparatur perencana di Perangkat Daerah
7.	Rendahnya Persentase Rekomendasi Hasil Monev. yang ditindaklanjuti	Hasil pelaksanaan Monev belum menyajikan permasalahan dan saran-saran perbaikan pencapaian target yang telah diperjanjikan	Belum optimalnya capaian kinerja hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada dokumen perencanaan tahun sebelumnya
8.	Masih Rendahnya Kinerja RPJMD yang tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas data masih kurang memadai; - Belum optimalnya Implementasi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih rendah 	Belum optimalnya konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah, antara pusat dan daerah

9.	Masih rendahnya nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP	Masih kurang memadainya dalam menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan alokasi penganggarnya, kualitas dan kuantitas data	Belum optimalnya capaian kinerja hasil dari pendampingan/desk intensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan
10.	Masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil kajian dan penelitian dalam pembangunan daerah	Belum optimalnya Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan inovasi daerah dan kerjasama dengan lembaga penelitian yang terdaftar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024”**.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dalam mewujudkan visinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, kabupaten, provinsi dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya;

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai terpilih periode 2021-2024, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bersama seluruh PD akan melakukan berbagai upaya. Di samping itu, dalam melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai terpilih periode 2021-2024, Bappeda sebagai lembaga perencana daerah akan berperan serta dalam menciptakan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis program prioritas (*money follow priority programe*).

Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai memiliki keterkaitan dengan Misi ke- 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 2.1 dari Perubahan RPJMD Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026. Bappedalitbang Kabupaten serdang bedagai berperan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik Oleh karena itu, Bappedalitbang Kabupaten serdang bedagai perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappedalitbang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai

Visi: "Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024".				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola	1. Belum adanya pedoman tata cara verifikasi dan evaluasi	1. Belum optimalnya keseragaman tingkat	1. Dukungan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

pemerintahan daerah yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku	dokumen perencanaan 2. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan masih rendah	ketepatan dalam pelaporan dari SKPD; 2. Belum optimalnya pengelolaan data pembangunan; 3. Pengembangan SDM bagi para aparatur perencana masih terbatas; 4. Pelaksanaan diklat/bimtek/pe latihan terbatas; 5. Pendanaan belum optimal.	(OPD) dan Komitmen para kepala OPD 2. Pengawasan oleh BPK, BPKP dan KPK 3. Diklat dari Pusbindiklatren Bappenas dan lembaga pelatihan lainnya
Program : 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; 4. Program penelitian dan pengembangan daerah.	3. Penggunaan sistem informasi masih rendah 4. SDM perencana masih rendah 5. Hasil kajian dan penelitian belum digunakan dalam merumuskan kebijakan daerah 6. Konsistensi antar dokumen perencanaan masih rendah 7. Pengendalian dan evaluasi belum optimal		

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapelitbang Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Bappenas

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Renstra Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kab.Serdang Bedagai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Kualitas dokumen perencanaan masih rendah	1. Belum ada pedoman tata cara verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan	Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

			2. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan masih rendah 3. Penggunaan sistem informasi masih rendah	
2.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Implementasi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih rendah	1. Konsistensi antar dokumen perencanaan masih rendah 2. Pengendalian dan evaluasi belum optimal	Penerapan <i>e-government</i>

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kualitas dokumen perencanaan masih rendah	- Belum ada pedoman tata cara verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan - Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan masih rendah - Penggunaan sistem informasi masih rendah - SDM perencana masih rendah - Hasil kajian dan	- Ketersediaan anggaran - Telah terverifikasinya Renja OPD sesuai dengan ketetapan yang berlaku. - Adanya korsiugahKPK

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			penelitian belum digunakan dalam merumuskan kebijakan daerah	

Telaahan Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung perbaikan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya Renstra Bappenas dan Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

Apabila diperhatikan sasaran umum Renstra Bappenas, dan Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Serdang

Bedagai adalah **“mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) merupakan aktivitas utama Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wajib melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tugas Bappedalitbang dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan pembangunan, merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki fungsi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sehingga tidak terlepas dari konteks penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, yang diperkuat dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana, arahan zonasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

- a. Peningkatan peran dan fungsi wilayah, dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan;
- b. Peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi;
- c. Pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan;
- d. Penetapan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan lindung dan;

- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang sebagai tindak lanjut dari tujuan dan sasaran tersebut meliputi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu RTRW memiliki muatan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, yang dirumuskan dalam mewujudkan sasaran penataan ruang. Indikasi program utama tersebut dihasilkan dari berbagai forum koordinasi, dialog, dan proses asistensi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perangkat daerah Kabupaten dan Provinsi serta kementerian/lembaga. Indikasi program memuat kepentingan sektor pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga indikasi program seharusnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Kabupaten agar tujuan penataan ruang dan pembangunan di Serdang Bedagai terwujud.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026,

sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Berikut isu-isu prioritas hasil KLHS RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, terkait urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

No.	Bidang Pembangunan	Urusan	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan	- Optimalisasi dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan standar dan berkualitas;
			- Terciptanya keselarasan antar dokumen perencanaan

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Memperhatikan beberapa hal di atas, identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaah lainnya, maka isu-isu strategis yang

berkembang di Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2. Pengoptimalan hasil dari pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam komponen perencanaan
4. Mengoptimalkan Kebijakan dan Komitmen Program yang Mendukung Percepatan Pengembangan Inovasi
5. Mendorong Ketersediaan SDM Penunjang Inovasi yang Berkelanjutan melalui Pembinaan dan Pelibatan Berbagai Pihak
6. Mendorong aktivitas Penelitian dan Pengelolaan Data sebagai Landasan Perencanaan Pengembangan Inovasi dan Program Pembangunan

Dengan memperhatikan berbagai kondisi yang berkembang baik di internal dan eksternal dan penilaian atas faktor-faktor pendukung tercapainya perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkualitas dilakukan analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya kegiatan pendampingan/desk intensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan
- b. Terdapat keselarasan RPJMD dengan Renstra, RPJMD dengan RKPD, Renja dengan RKPD dan Renstra dengan Renja
- c. Penetapan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan sudah terukur
- d. Memanfaatkan teknologi dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih terdapat kesulitan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dengan alokasi penganggarnya
- b. Kualitas dan kuantitas data masih kurang memadai
- c. Hasil Monev masih terbatas pada DAK/TP dan belum menjawab permasalahan yang dihadapi
- d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan
- e. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Tersedianya aplikasi perencanaan
- b. Dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra, PK, RKPD dan Renja baik pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah
- c. Penetapan perencanaan tahunan sesuai dengan rencana perangkat

4. Ancaman (*Threat*)

- a. OPD membuat kegiatan di luar dokumen perencanaan sebelumnya
- b. Masih terdapat rumusan strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil (outcome) sesuai dengan levelnya.
- c. Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja Kepala Daerah
- d. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis TIK melalui SIPD

Meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT.

S – O

- a. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah lebih optimal

- b. Perencanaan pembangunan lebih terarah dan dapat menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten
- c. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai melalui perencanaan yang hirarki dan konsisten

W – O

- a. Mendorong perbaikan kinerja dengan memberikan informasi yang handal
- b. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam evaluasi kinerja perangkat daerah
- c. Menyusun proceeding report/progress kemajuan Monev DAK berdasarkan data real di lapangan serta menjawab permasalahan yang dihadapi

T – S

- a. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat;
- b. Mengoptimalkan peran Bappedalitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan;
- c. Mengoptimalkan potensi SDM guna mengatasi kebijakan penataan pegawai sesuai kompetensi;
- d. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

T – W

- a. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat;
- b. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan;
- c. Menyelaraskan perundangan-undangan guna mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode *Profesional Judgement* maka terdapat 7 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kegiatan pendampingan/desk intensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat;
- c. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan;
- d. Menyelaraskan perundangan-undangan guna mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi;
- e. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
- f. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan;

Dari hasil perumusan dan pembahasan di atas, adapun beberapa faktor penentu keberhasilan ataupun strategi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil (*Outcome*) melalui aparatur perencana yang tangguh dan profesional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappedalitbang yang cukup strategis (Bappedalitbang sebagai *policy maker*);
2. Mengoptimalkan potensi SDM guna mengatasi kebijakan penataan Pegawai/ASN sesuai kompetensi (Bappedalitbang sebagai *think tank*);
3. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencana;
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi (Bappedalitbang sebagai *administrator*);
5. Meningkatkan pendampingan/deskintensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan serta di dukung dengan penggunaan aplikasi perencanaan
6. Menggunakan hasil kajian dan penelitian dalam perumusan kebijakan daerah.



Strategi Alternatif dan Pilihan dengan Analisis SWOT

	Kekuatan <ul style="list-style-type: none">a. Adanya kegiatan pendampingan/desk intensif yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaanb. Renstra telah diformalkanc. Penetapan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan sudah terukurd. Memanfaatkan teknologi dalam melakukan evaluasi perangkat daerah	Kelemahan <ul style="list-style-type: none">a. Masih terdapat kesulitan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dengan alokasi penganggarnyab. Kualitas dan kuantitas data masih kurang memadaic. Hasil Monev masih terbatas pada DAK/TP dan belum menjawab permasalahan yang dihadapid. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunane. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti
Peluang <ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya aplikasi perencanaanb. Dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra, PK, RKPD dan Renja baik pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerahc. Penetapan perencanaan tahunan sesuai dengan rencana perangkat daerahd. Adanya kerjasama dengan lembaga penelitian yang terdaftar	S – O <ul style="list-style-type: none">a. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah lebih optimalb. Perencanaan pembangunan lebih terarah dan dapat menjawab permasalahan yang ada di Kabupatenc. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai melalui perencanaan yang hirarki dan konsisten	W – O <ul style="list-style-type: none">a. Mendorong perbaikan kinerja dengan memberikan informasi yang handalb. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam evaluasi kinerja perangkat daerahc. Menyusun proceeding report/progress kemajuan Monev DAK berdasarkan data real di lapangan serta menjawab permasalahan yang dihadapi



Tantangan	T – S	T – W
<p>a. OPD membuat kegiatan di luar dokumen perencanaan sebelumnya</p> <p>b. Masih terdapat rumusan strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil (outcome) sesuai dengan levelnya.</p> <p>c. Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja Kepala Daerah</p> <p>d. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis TIK melalui SIPD</p>	<p>a. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat;</p> <p>b. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan;</p> <p>c. Mengoptimalkan potensi SDM guna mengatasi kebijakan penataan pegawai sesuai kompetensi;</p> <p>d. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.</p>	<p>a. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat;</p> <p>b. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan;</p> <p>c. Menyelaraskan perundangan-undangan guna mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi.</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Pengampu Misi ke 2 (dua) yakni Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan misi, adalah :

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1

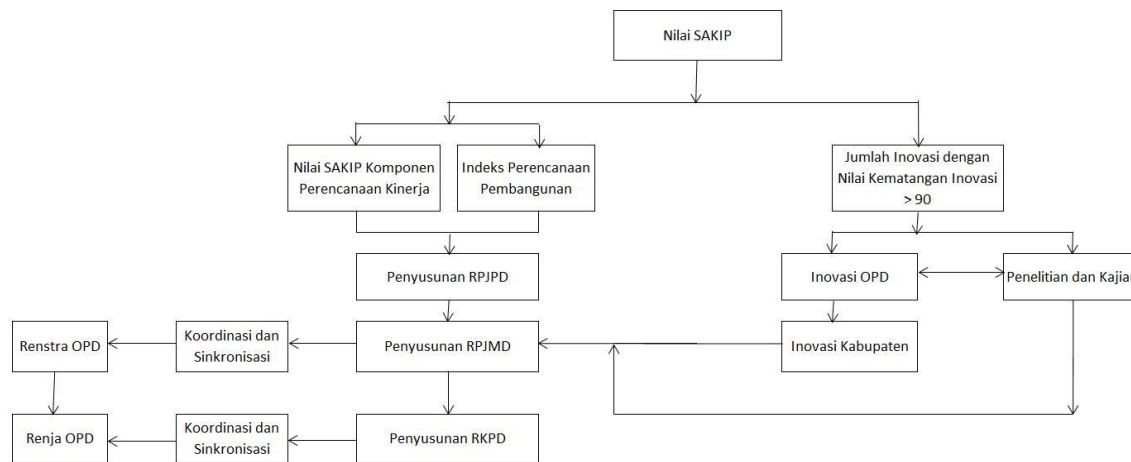
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP	BB	BB	-	-	-	-
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP	24	25	-	-	-	-
			Presentase Keselarasan Sasaran Program : - Renja dengan RKPD - RPJMD dengan Renstra - Renstra dengan Renja - RPJMD dengan RKPD	100%	100%	-	-	-	-
			Persentase Rata-rata capaian kinerja utama pemerintah daerah	80%	82%	-	-	-	-
			Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah	80%	82%	-	-	-	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76	-	-	-	-
		Mewujudkan Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang Dijadikan Kebijakan Daerah	85%	90%	-	-	-	-



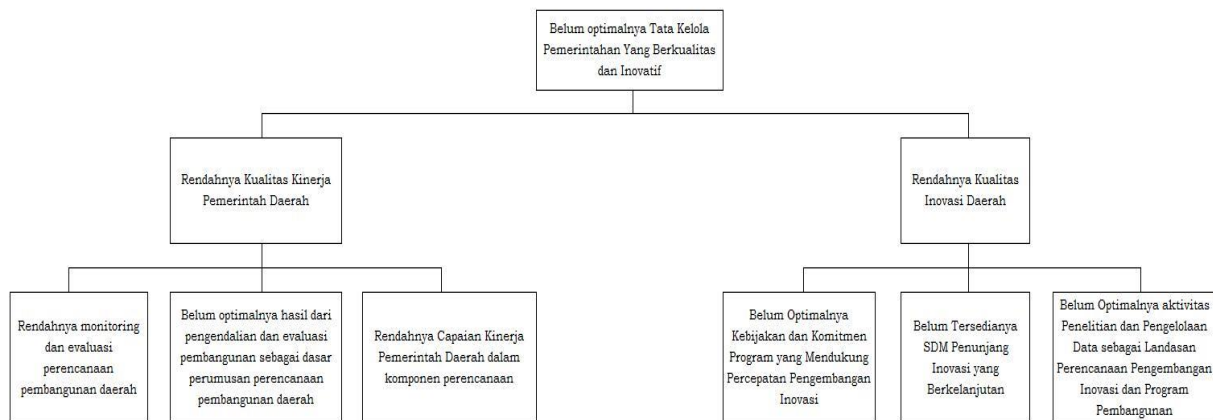
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Setelah Perubahan									
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah melalui Akuntabilitas dan Perencanaan Kinerja		Nilai SAKIP	-	-	71 (BB)	74 (BB)	77 (BB)	80,03 (A)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	24	25	26	26,5
			Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan Inovasi > 90	-	-	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi

Gambar 4.1
Logical Framework Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 4.2

Pohon Masalah Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Sesudah Perubahan





Gambar 4.3

Cascading Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Sesudah Perubahan

Level Kinerja					Kinerja Jabatan
Kinerja Strategis Daerah	Pemerintahan yang baik dan bersih				Tujuan RPD
	Indeks Reformasi Birokrasi				Indikator Tujuan RPD
	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, lincah, dan Kolaboratif				Sasaran RPD
	Nilai SAKIP				Indikator Sasaran RPD
Kinerja Strategis Bidang Urusan Perencanaan dan Penelitian	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah melalui Akuntabilitas dan Perencanaan Kinerja				Tujuan Renstra Bappedalitbang
	Nilai SAKIP				Indikator Tujuan Renstra
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Sasaran Renstra Bappedalitbang
	1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 2. Indeks Perencanaan Pembangunan		Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan Inovasi > 90		Indikator Sasaran
Kinerja Manajerial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat 3. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaannya sesuai pedoman dan tepat waktu	1. Persentase dok. perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu 2. Persentase dok. hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi penguat Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Inovasi Daerah	Indikator Program



Kinerja Manajerial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan unsur perencanaan	PK Jafung / Eselon 4
	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Persentase Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan yang Disusun	Indikator Kegiatan	



Kinerja Manajerial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kegiatan unsur penelitian	PK Jafung / Eselon 4
	1. Persentase Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Inovasi Daerah	2. Persentase Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan untuk mendukung Inovasi Daerah	2. Persentase Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Inovasi Daerah	2. Persentase Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan dan disosialisasikan	Indikator Kegiatan	



Kinerja Operasional	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Baran Cetak dan Penggandaan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Sekretariat	PK Jafung / Pelaksana
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Indikator Sub Kegiatan		



Kinerja Operasional	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sub Kegiatan bidang PPM dan SDA	PK Jafung / Pelaksana
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Indikator Sub Kegiatan	



Kinerja Operasional	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan bidang PPEP	PK Jafung / Pelaksana
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD / Rancangan Teknokratik	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator Sub Kegiatan	



Kinerja Operasional	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan	dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Sub Kegiatan bidang Litbang	PK Jafung / Pelaksana
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Indikator Sub Kegiatan	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024			
Misi II : Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah melalui Akuntabilitas dan Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat sistem informasi data terpadu	Penguatan kualitas data pembangunan daerah terpadu
		Menerapkan proses perencanaan berbasis elektronik	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan berbasis elektronik
		Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Pengadaan Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan (e-Monev)
		Pengoptimalan hasil dari pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
	Peningkatan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah		
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Mengoptimalkan Kebijakan dan Komitmen Program yang Mendukung Percepatan Pengembangan Inovasi	Melaksanakan kebijakan dan komitmen program yang mendukung percepatan pengembangan inovasi



		Mendorong Ketersediaan SDM Penunjang Inovasi yang Berkelanjutan melalui Pembinaan dan Pelibatan Berbagai Pihak	Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM penunjang inovasi yang berkelanjutan
		Mendorong aktivitas Penelitian dan Pengelolaan Data sebagai Landasan Perencanaan Pengembangan Inovasi dan Program Pembangunan	Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang terdaftar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Program dan kegiatan Perangkat Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Sebelum Perubahan

[illegible]



Tu ja n	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penan ggunj awab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5 0 1 1	0 0 1		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	88	5.657 .349. 477	BB	5.857 .349. 477									Bappe da	Ka b. Ser da ng Be da gai		
		5 0 1 1	0 0 2	2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawa ban keuangan	NA	3	4.503 .857. 277	3	4.649 .030. 458												
		5 0 1 1	0 0 2	2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	43 Orang/ 12 Bulan	4.435 .567. 277	45 Orang/ 12 Bulan	4.435 .567. 277												
		5 0 1 1	0 0 2	2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 ob	2 Dokum en	68.29 0.000	2 Dokum en	204.1 20.00 0												
		5 0 1 1	0 0 2	2 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA			1 Laporan	9.343 .181												
		5 0 1 1	0 0 5	2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	NA	4 Dokum en	68.43 0.800	4 Dokum en	50.00 0.000												



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5010210	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	70 Orang	48.43 0.800	50 Orang	25.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010211	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	4 Orang	20.00 0.000	5 Orang	25.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	NA	8 Laporan	357.6 06.200	8 Laporan	310.0 00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010201	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	6 Paket	11.20 9.300	6 Paket	12.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010202	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (alat tulis kantor yang tersedia)	1 Tahun	3 Paket	70.00 0.000	3 Paket	53.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (peralatan kebersihan)	1 Tahun	2 Paket	16.60 9.100	2 Paket	20.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5010204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (makanan dan minuman rapat yang disediakan)	1 Tahun	2 Paket	16.380.000	2 Paket	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010205	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Brg Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	6 Paket	58.003.000	6 Paket	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan)	1 Tahun	1 Dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (perjalanan dinas)	1 Tahun	1 Laporan	130.158.000	1 Laporan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010206	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (jasa pemeliharaan website Bappeda Kab Serdang Bedagai)	2 Kali	1 Dokumen	20.246.800	1 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5010209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	5 Laporan	329.3 33.000	5 Laporan	231.0 26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5010209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (BBM,	1 Unit	1 Unit	80.09 3.500	1 Unit	46.42 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				suku cadang, premi asuransi, oli, pajak STNK mobil jabatan)																	
		5010209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (BBM, suku cadang, premi asuransi, oli, pajak STNK)	9 Unit	9 Unit	166.8 93.500	9 Unit	146.6 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penan ggunj awab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		501205	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (peralatan kantor / rumah tangga yang dipelihara)	1 Tahun	1 Unit	69.350.000	1 Unit	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		501207	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		501209	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Unit	12.996.000	1 Unit	12.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		
		5013	II. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kinerja RPJMD Yang Tercapai	88,18%	100%	478.242.500	100%	628.242.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kab. Serdang Bedagai		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lo kas i
		5010302	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	6 Dokumen	100.1 00.40 0	6 Dokumen	210.0 00.40 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5010304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 Kali	20.03 8.400	4 Kali	75.00 0.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5010308	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Kali	80.06 2.000	13 Kali	135.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Tujuan u a n	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penan ggungj Penan ggungj awab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5002	01302	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi, Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Koperasi dan JKM	NA	6 Dokum en	127.9 41.70 0	6 Dokum en	235.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5002	01302	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	5 Kali	5 Kali	60.20 2.000	5 Kali	115.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
		5002	01302	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Tahun	1 Tahun	67.73 9.700	1 Tahun	120.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Tuj ua n	Sasaran	Kode					Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja Akhir Renstra		Penanggu ngjawab	Loka
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)									
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
		5010303	2	0	NA	6 Dokum en	250.2 00.40 0	6 Dokum en	183.2 42.10 0																				
		5010303	2	0	NA	5 Kali	51.20 4.600	5 Kali	88.24 2.100																				
		5010303	2	0	NA	6 Kali	198.9 95.80 0	6 Kali	95.00 0.000																				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6(2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5 0 1	0 1 2		III. PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Money Yang Ditindaklanjuti	NA	100%	1.074 .444. 800	100%	1.224 .444. 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappe da	Ka b. Ser da ng Be da gai
		5 0 1	0 1 2	0	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	NA	7 Dokum en	712.1 88.80 0	7 Dokum en	760.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 0 1	0 1 2	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terjaringnya aspirasi masyarakat	100 Orang		100 Orang	50.00 0.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 0 1	0 1 2	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Usulan Kegiatan Prioritas	960 Usulan di 17 Kec.		1100 Usulan di 17 Kec.	50.00 0.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 0 1	0 1 2	0	Pelaksanaan	Jumlah kegiatan	7	7 Kegiat a n	269.9 31.00 0	7	250.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				5	Musrenbang Kabupaten/Ko ta	Musrenbang yang dilaksanakan/dihad iri	10 Eks	10 Eks		10 Eks		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Laporan Proceeding Report Musrenbang RKPD						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



T u j u a n	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penan ggungj awab	Lo kas
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6(2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5 . 0 1	0 1	0 2	0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	NA	100 Eks 200 Orang	442.2 57.80 0	100 Eks 200 Orang	410.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 . 0 1	0 1	0 2	0 7	Analisis Data dan Informasi Pemerintaha n Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah data dan Informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	NA	3 Dokum en	159.7 11.40 0	3 Dokum en	256.4 44.80 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 . 0 1	0 1	0 2	0 7	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Mendata Informasi Pembangunan Daerah	NA	1 Tahun	48.17 8.500	1 Tahun	50.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 . 0 1	0 1	0 2	0 7	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya Operasional TKPKD Tingkat Kabupaten	4 kali	4 kali	111.5 32.90 0	4 kali	115.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 . 0 1	0 1	0 2	0 7	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah profil daerah Kab. Serdang Bedagai yang terinformasi kepada Masyarakat	NA	-	-	1 paket	91.44 4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Tu j u a n	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penan ggung jab	Lo kas		
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6(2026)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5 0 1	0 1 2	0 2 3	0 3	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	NA	2 Dokum en	202.5 44.60 0	2 Dokum en	208.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 0 1	0 1 2	0 2 3	0 3	Pengendalian 2 Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah rapat Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	NA	4 Kali	27.13 9.400	4 Kali	28.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 0 1	0 1 2	0 2 3	0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah	NA	12 bulan	175.4 05.20 0	12 bulan	180.0 00.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
SASARAN II																								
	Mewujudkan Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah					Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah		NA	85%		90%		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5 0 5	0 2			IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	85%	79.67 1.200	90%	93.06 3.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappe da		



Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggung jawab	Lo kas
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6(2026)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		5	0 5	0 2	2 . 0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan uji coba penerapan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	NA	3 Dokumen	79.67 1.200	3 Dokumen	30.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	0 5	0 2	2 . 0 1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah rapat koordinasi kelitbangan	12 Bulan	12 Bulan	79.67 1.200	12 Bulan	30.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	0 5	0 2	2 . 0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan uji coba penerapan Bidang Sosial dan Kependudukan	NA	4 Dokumen	0	4 Dokumen	30.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	0 5	0 2	0 . 0 2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen kajian penelitian dan pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan	NA	-	-	1 Dokumen	30.00 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lokasi	
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6(2026)				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5	05	02	203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan uji coba penerapan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	NA	5 Dokumen	0	5 Dokumen	30.06 3.097									-		
		5	05	02	203	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang dilaksanakan	NA			1 Dokumen	30.06 3.097									-		
		5	05	02	204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang diterapkan	NA	4 Inovasi		4 Inovasi	3.000 .000									-		
		5	05	02	203	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	NA			1 Indeks	3.000 .000									-		
										7.289 .707. 977		7.803 .099. 874											



Setelah Perubahan

Tu ju an	Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i															
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp																					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																				
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN																																						
TUJUAN																																												
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah melalui Akuntabilitas dan Perencanaan Kinerja							Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23,05		-	-		24		25		26		26,50		26,50																							
SASARAN I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah							Indeks Perencanaan Pembangunan		-	-			100%		100%		100%		100%		100%																							
		5	0	0	1	1	L. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B					A (84,00)	5.917.349.477	A (85,00)	5.557.349.477	A (86,00)	6.102.349.477	A (87,00)	6.202.349.477	A (87,00)	6.202.349.477	Bappedalitbang	Kab. Serdang Bedagai																			
		5	0	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA		-	-	-	100%	48.842.000	100%	67.242.000	100%	85.047.000	100%	136.804.678	100%	136.804.678																					
		5	0	0	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA		-	-	-	2 Dokumen	11.433.000	2 Dokumen	15.533.000	2 Dokumen	20.874.000	2 Dokumen	26.814.000	2 Dokumen	26.814.000																					



Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
									Tahun-1 (2021)				Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		5	0	0	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	NA				1 Dokumen	9.314. 000	1 Dokume n	12.414.0 00	1 Dokume n	15.75 5.000	1 Dokume n	25.695 .000	1 Dokumen	25.695.00 0				
		5	0	0	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	NA				1 Dokumen	9.212. 000	1 Dokume n	14.412.0 00	1 Dokume n	17.65 3.000	1 Dokume n	27.593 .000	1 Dokumen	27.593.00 0				
		5	0	0	2	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	NA				1 Dokumen	9.565. 000	1 Dokume n	12.365.0 00	1 Dokume n	15.00 6.000	1 Dokume n	28.946 .000	1 Dokumen	28.946.00 0				
		5	0	0	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	NA				1 Dokumen	9.318. 000	1 Dokume n	12.518.0 00	1 Dokume n	15.75 9.000	1 Dokume n	27.756 .678	1 Dokumen	27.756.67 8				
		5	0	0	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA					100%	4.860. 598.87 7	100%	4.729.67 1.627	100%	4.454. 311.4 77	100%	4.474. 580.79 9	100%	4.474.580 .799			



Tu ju an	Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5	0	1	0	1	2 . 0 2	1 . 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	-	-	-	-	34 Orang /Bulan	4.993.115,60	34 Orang/ Bulan	4.549.124.005	36 Orang /Bulan	4.235.377.477	36 Orang/ Bulan	4.249.703.799	36 Orang/ Bulan	4.249.703.799		
		5	0	1	0	1	2 . 0 2	1 . 2	1 . 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 ob	-	-	-	-	2 Dokume n	173.759.622	2 Dokume n	204.120.000	2 Dokume n	204.120.000	2 Dokumen	204.120.000			
		5	0	1	0	1	2 . 0 2	1 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap. Keu. Akhir Tahun SKPD dan Lap. Hasil Koord PenyusLap.Keu. Akhir Tahun SKPD	NA	-	-	-	-	1 Laporan	9.277.499	1 Laporan	6.788.000	1 Laporan	14.817.000	1 Laporan	20.757.000	1 Laporan	20.757.000		
		5	0	1	0	1	2.05	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA	-	-	-	-	-	100%	109.583.000	100%	126.767.000	100%	166.587.000	100%	166.587.000			
		5	0	1	0	1	2 . 0 5	1 . 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	-	-	-	-	-	40 Orang	35.583.000	40 Orang	40.883.000	40 Orang	51.823.000	40 Orang	51.823.000			
		5	0	1	0	1	2 . 0 5	1 . 3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	-	-	-	-	-	40 Orang	24.000.000	40 Orang	25.000.000	40 Orang	26.000.000	40 Orang	26.000.000			



Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5	0	0	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	NA							10 Orang	50.000.0 00	10 Orang	50.00 0.000	10 Orang	50.000 .000	10 Orang	50.000.00 0		
		5	0	0	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA					100%	302.14 4.000	100%	207.794. 700	100%	369.5 39.70 0	100%	476.23 2.700	100%	476.232.7 00		
		5	0	0	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun					7 Paket	12.200 .000	10 Paket	8.000.00 0	10 Paket	19.11 2.000	10 Paket	35.000 .000	10 Paket	35.000.00 0		
		5	0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun					6 Paket	53.300 .000	6 Paket	25.000.0 00	6 Paket	68.09 7.000	6 Paket	75.037 .000	6 Paket	75.037.00 0		
		5	0	0	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun					6 Paket	18.000 .000	6 Paket	11.509.0 00	6 Paket	29.53 8.000	6 Paket	40.478 .000	6 Paket	40.478.00 0		
		5	0	0	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun					2 Paket	15.500 .000	2 Paket	11.891.0 00	2 Paket	18.92 0.000	2 Paket	25.860 .000	2 Paket	25.860.00 0		
		5	0	0	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengoondaan	Jumlah Paket Brg Cetakan dan Pengoondaan yang Disediakan	1 Tahun					6 Paket	36.500 .000	6 Paket	27.258.7 00	6 Paket	58.28 7.700	6 Paket	73.227 .700	6 Paket	73.227.70 0		



Tu ju an	Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5010206	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	-	-	-	-	50 Laporan	131.00 0.000	120 Laporan	115.136. 000	120 Laporan	160.0 00.00 0	120 Laporan	190.10 5.000	120 Laporan	190.105.0 00		
		5010206	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(jasa pemeliharaan website Bappeda Kab Serdang Bedagai)	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokume n	23.000.0 00	1 Dokume n	23.00 0.000	1 Dokume n	25.000 .000	1 Dokumen	25.000.00 0		
		5010207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA	-	-	-	-	100%	92.686 .000	100%	58.434.5 00	100%	360.4 03.00 0	100%	194.22 3.000	100%	194.223.0 00		
		5010207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	234.00 0.000	1 Unit	234.000.0 00		



Tu ju an	Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
		1	2	3	4	5				Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
																								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		5010207	01107	207	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	-	-	-	-	-	2 Unit	35.000.000	2 Unit	236.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000					
		5010207	01107	207	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	-	-	-	-	2 Unit	12.644.000	2 Unit	26.285.000	2 Unit	36.085.000	2 Unit	40.025.000	2 Unit	40.025.000	2 Unit	40.025.000				
		5010207	01107	207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	-	-	-	-	22 Unit	40.000.000	25 Unit	20.806.000	25 Unit	70.835.000	25 Unit	78.775.000	25 Unit	78.775.000	25 Unit	78.775.000				
		5010208	01108	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA	-	-	-	-	100%	317.934.000	100%	308.400.000	100%	334.375.000	100%	340.315.000	100%	340.315.000	100%	340.315.000				
		5010208	01108	208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	-	-	-	-	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.400.000				



Tu ju an	Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5010208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Orang	-	-	-	-	17 Laporan	306.00 0.000	17 Laporan	306.000. 000	17 Laporan	306.0 00.00 0	17 Laporan	306.00 0.000	17 Laporan	306.000.0 00		
		5010209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	NA	-	-	-	-	100%	240.43 8.600	100%	235.677. 150	100%	371.9 06.30 0	100%	413.60 6.300	100%	413.606.3 00		
		5010209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	46.420 .000	1 Unit	46.420.0 00	1 Unit	65.16 9.150	1 Unit	80.109 .150	1 Unit	80.109.15 0		
		5010209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	-	-	-	-	12 Unit	147.27 1.000	12 Unit	153.260. 150	12 Unit	175.2 89.15 0	12 Unit	185.22 9.150	12 Unit	185.229.1 50		



Tu ju an	Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp	Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	-	-	-	-	34 Unit	25.500 .000	34 Unit	25.471.0 00	34 Unit	85.50 0.000	34 Unit	90.440 .000	34 Unit	90.440.00 0		
		5	0	0	2	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Tahun	-	-	-	-	1 Unit	11.295 .600	1 Unit	10.526.0 00	1 Unit	25.55 5.000	1 Unit	30.495 .000	1 Unit	30.495.00 0		
		5	0	0	3		II. PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH	1. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	-	-	-	-	100%	683.24 2.600	100%	108.695. 000	100%	873.2 42.50 0	100%	983.24 2.500	100%	983.242.5 00	Bapp edalit bang	Ka b. Ser dan g Be dag ai
								2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
								3. Persentase perangkat	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				



Tu ju an	Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		501	02.013		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	-	-	-	-	100%	181.088.400	100%	75.195.000	100%	318.544.900	100%	346.216.900	100%	346.216.900		



Tu ju an	Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA				24 Dokumen	31.500 .000	24 Dokume n	33.500.0 00	24 Dokume n	35.00 0.000	24 Dokume n	37.500 .000	24 Dokumen	37.500.00 0				
		5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah	NA				8 Laporan	25.000 .000	8 Laporan	10.000.0 00	8 Laporan	25.00 0.000	8 Laporan	27.300 .000	8 Laporan	27.300.00 0				
		5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 Kali				1 Laporan	26.708 ,900	1 Laporan	38.000.0 00	1 Laporan	102.0 00.00 0	1 Laporan	101.50 0.000	1 Laporan	101.500.0 00				
		5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA				24 Dokumen	36.500 .000	24 Dokume n	29.500.0 00	24 Dokume n	31.00 0.000	24 Dokume n	37.316 .900	24 Dokumen	37.316.90 0				



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
		1	2	3	4				Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		5 0 1	0 3	2 . 0 1	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	NA					8 Laporan	27.793 .000	8 Laporan	10.000.0 00	8 Laporan	33.00 0.000	8 Laporan	39.300 .000	8 Laporan	39.300.00 0				
		5 0 1	0 3	2 . 0 1	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Kali					1 Laporan	33.586 .500	1 Laporan	46.195.0 00	1 Laporan	96.54 4.900	1 Laporan	103.30 0.000	1 Laporan	103.300.0 00				
		5 0 1	0 3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dgn Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	NA NA	- -	- -	- -	- -	100% 100%	223.85 9.000 100%	100% 100%	222.492. 500 100%	100% 100%	279.6 18.00 0 100%	100% 100%	338.28 2.000 100%	100% 100%	338.282.0 00 100%					



Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		50103	2022	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	NA				4 Laporan	18.915.000	4 Laporan	50.745,400	4 Laporan	17.937.000	4 Laporan	21.425.000	4 Laporan	21.425.000							
		50103	2024	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Kali				4 Laporan	71.500.000	4 Laporan	40.557.000	4 Laporan	97.029.000	4 Laporan	142.212.000	4 Laporan	142.212.000							
		50103	2026	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	NA				3 Laporan	18.894.000	3 Laporan	60.246,000	3 Laporan	17.809.000	3 Laporan	15.392.000	3 Laporan	15.392.000							
		50103	2028	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Tahun				3 Laporan	77.616.000	3 Laporan	70.944,500	3 Laporan	108.248.000	3 Laporan	116.831.000	3 Laporan	116.831.000							



Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
		1	2	3	4				Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		5	0	0	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan	NA	-	-	-	-	100%	267.00 4.100	100%	121.546. 000	100%	275.0 79.60 0	100%	298.74 3.600	100%	298.743. 600				
							2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	-		-		100%		100%		100%		100%							
		5	0	0	2 . 0 3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastrukt	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	NA					3 Laporan	17.272 .000	3 Laporan	20.546.0 00	3 Laporan	17.18 7.000	3 Laporan	15.770 .000	3 Laporan	15.770.0 00				



Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i	
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	NA					3 Laporan	88.000.000	3 Laporan	21.000.000	3 Laporan	87.623.000	3 Laporan	105.206.000	3 Laporan	105.206.000			
		5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	NA					3 Laporan	19.236.100	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	16.028.100	3 Laporan	15.611.100	3 Laporan	15.611.100			
		5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	NA					3 Laporan	104.500.000	3 Laporan	65.000.000	3 Laporan	107.411.500	3 Laporan	115.164.500	3 Laporan	115.164.500			
		5	0	0	2	0	III. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dok. perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	NA	-	-	-	-	100%	941,511,054	100%	694,087,200	100%	1.479.444.800	100%	1.595.444.800	100%	1.595.444.800	Bappedalitbang	Kab. Serdang Bedagai
							2. Persentase dok. hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu		-		-		100%		100%		100%		100%		100%				



Tu ju an	Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
		1	2	3	4	5				Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	NA	-	-	-	395.8 86.28 3	5 Dokumen	755.00 5,800	5 Dokume n	512,162, 650	3 Dokume n	834.6 87.72 8	2 Dokume n	904.26 6.000	2 Dokumen	904.266.0 00				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	2.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD / Rancangan Teknokratik	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokume n	20.93 5.000	1 Dokume n	27.535 .000	1 Dokumen	27.535.00 0				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	2.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	NA	-	-	-	-	2 Berita Acara	981.32 6,000	2 Berita Acara	33,227.2 50	2 Berita Acara	28.37 5.000	1 Berita Acara	35.975 .000	1 Berita Acara	35.975.00 0				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	960 Usulan di 17 Kec.	-	-	-	-	4 Berita Acara	20,530 ,468	3 Berita Acara	21,241.0 00	4 Berita Acara	27.36 5.000	3 Berita Acara	28.965 .000	3 Berita Acara	28.965.00 0				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	2.01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	-	-	-	-	2 Berita Acara	89,560 ,036	2 Berita Acara	210,052, 010	2 Berita Acara	305.3 97.50 0	1 Berita Acara	313.99 7.500	1 Berita Acara	313.997.5 00				



Tu ju an	Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
		1	2	3	4	5				Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	1	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 1	1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	603.95 3.970	5 Dokume n	243.632, 400	3 Dokume n	448.9 06.22 8	2 Dokume n	476.88 4.500	2 Dokumen	476.884.5 00				
		5 0 1	0 1	0 2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Disusun	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Buku	396.6 34.20 0	1 Buku	429.43 4.200	1 Buku	429.434.2 00				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokume n	75.21 1.400	1 Dokume n	85.811 .400	1 Dokumen	85.811.40 0				
		5 0 1	0 1	0 2	2 0 2	1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	47 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	46 Orang	130.2 11.40 0	46 Orang	137.81 1.400	46 Orang	137.811.4 00				



Tu ju an	Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kas i
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5 0 1	0 1 2	0 2 0 2	2 0 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Buku 191.2 11.40 0	1 Buku 205.81 1.400	1 Buku 205.811.4 00					
		5 0 1	0 1 2	0 2 0 3	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan yang Disusun	NA	-	-	-	-	3 Dokumen	144.02 3.914	3 Dokume n	170.907. 170	3 Dokume n	248.1 22.87 2	3 Dokume n	261.74 4.600	3 Dokumen	261.744.6 00			
		5 0 1	0 1 2	0 2 0 3	2 0 3	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5 0 1	0 1 2	0 2 0 3	2 0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	NA	-	-	-	-	3 Laporan	144.02 9.914	3 Laporan	170.907. 170	3 Laporan	311.9 05.20 0	3 Laporan	317.50 5.200	3 Laporan	317.505.2 00			
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
	SASARAN Daerah	II : Meningkatkan Kualitas Inovasi					Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan Inovasi > 90	NA	-			-		1 Inovasi		2 Inovasi		2 Inovasi		2 Inovasi		2 Inovasi			



Tu ju an	Sasara n	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondiei Kinerja Akhir Renstra		PD Pena nggu ngia wab	Lo kat i
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5	0	0		IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi penguat Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	-	-	-	-	100%	472.201.387	100%	550.000.000	100%	700.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	Bapp edali bang	Ka b. Ser dar g Be dag ai
							2. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan		-	-			100%		100%		100%		100%		100%			
							yang menjadi Inovasi Daerah																	
		5	0	0	2	201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1. Persentase Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Inovasi Daerah	NA	-	-	-	100%	273.740.265	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
							2. Persentase Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-		100%		100%		100%		100%		100%			
		5	0	0	2	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	NA				1 Laporan	143.646.540							1 Laporan	143.646.540		
									-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-				



Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penang ungjawa b	Lokas i
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5	05	02	2.0	08	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000. 000	-	-	1 Laporan	100.000. 000		
		5	05	02	2.0	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	12 Bulan	-	-	-	-	1 Laporan	130.093. 725	1 Laporan	100.000.00 0	1 Laporan	100.000. 000	1 Laporan	100.000.00 0	1 Laporan	100.000. 000	
		5	05	02	2.02			2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1. Persentase Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependuduka n untuk mendukung inovasi Daerah	NA	-	-	-	-	-	100%	100.000.00 0	100%	100.000. 000	100%	200.000.00 0	100%	200.000. 000		
									2. Persentase Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependuduka n untuk mendukung Perencanaan Pembanguna n Daerah	NA	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%			
		5	05	02	2.0	03	2	03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000. 000	-	-	1 Dokumen	100.000. 000		



Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000						
		5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000							
		5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000							
		5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Inovasi Daerah	NA	-	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000					
								Persentase Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%								
		5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22
		5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
		5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000		
		5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
		5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan dan disosialisasikan	NA	-	-	-	-	100%	198.461.122	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	450.000.000		
		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	NA	-	-	-	-	2 Laporan	198.461.122	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra		PD Penanggun- jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
										Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	NA		-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	44.995.600	-	-	1 Laporan	44.995.600		
		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	NA		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		
											7.289.707.977		7.803.099.874		8.007.192.870		6.956.113.939		8.742.948.121		9.130.095.527		47.929.158.308		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023-2026, maka dalam penyusunannya Dokumen Perubahan Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra, artinya indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappedalitbang yang telah dicantumkan dalam target kinerja P-RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Bappedalitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam P-RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai tabel berikut :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
Sebelum Perubahan									
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
I.1	PERENCANAAN								
	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD								
1	Nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP	23,05	24	25	-	-	-	-	-
2	Presentase Keselarasan Sasaran Program :	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	- Renja dengan RKPD,								
	- RPJMD dengan Renstra,								
	- Renstra dengan Renja,								
	- RPJMD dengan RKPD								
3	Persentase Rata-rata capaian kinerja utama pemerintah daerah	NA	80%	82%	-	-	-	-	-
4	Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah	NA	80%	82%	-	-	-	-	-
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	75	76	-	-	-	-	-
I.2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD								
1	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	NA	85%	90%	-	-	-	-	-
I.1	PERENCANAAN								
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah								
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	-	-	-	-	-
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Monev. yang ditindaklanjuti	NA	100%	100%	-	-	-	-	-
3.	Persentase Kinerja RPJMD Yang tercapai	88,18%	100%	100%	-	-	-	-	-
I.2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD								
1.	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	85%	90%	-	-	-	-	-



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
Setelah Perubahan									
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
I.1	PERENCANAAN								
	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD								
1	Nilai SAKIP	65,21 (B)	-	-	71 (BB)	74 (BB)	77 (BB)	80,03 (A)	80,03 (A)
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23,05	-	-	24	25	26	26,5	26,5
3	Indeks Perencanaan Pembangunan	NA	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
I.2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah								
1	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan Inovasi > 90	NA	-	-	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sebelum Perubahan					
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP	Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil dalam artian telah menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud; Indikator keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, yakni SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound</i>); Target kinerja telah ditetapkan dengan baik, dalam artian selaras dengan RPJMD dan berdasarkan argument dan perhitungan yang jelas; Dokumen renstra telah selaras dengan RPJMD dan telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan; Target renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; Publikasi Dokumen Perencanaan; Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai; Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja; Monitor Rencana aksi secara berkala. 	Bappeda
		2. Presentase Keselarasan Sasaran Program :			Bappeda
		- Renja dengan RKPD,	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja yang sesuai dgn RKPD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RKPD}} \times 100\%$	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- RPJMD dengan Renstra,	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Jumlah Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$	
		- Renstra dengan Renja,	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja yang sesuai dgn Renstra}}{\text{Jumlah Sasaran pada Renstra}} \times 100\%$	
		- RPJMD dengan RKPD	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Jumlah Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$	
		3. Persentase Rata-rata capaian kinerja utama pemerintah daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah IKU Pemerintah Daerah yang Tercapai}}{\text{Jumlah IKU Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah IKU Perangkat Daerah yang Tercapai}}{\text{Jumlah IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$	
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor IKM} = \frac{\text{Total unsur yang terisi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	
2.	Mewujudkan Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	Jumlah kelitbang yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kegiatan kelitbang sesuai (Renja Perangkat Daerah tahunberkenaan) yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2011)	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Penelitian/Kajian Yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Bappeda



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sesudah Perubahan					
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah melalui Akuntabilitas dan Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang komponen perencanaan yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah	Komponen perencanaan yang ada di LHE KemenPAN-RB	Bappedalitbang
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator yang menggambarkan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Ket : a = Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan b = Persentase dokumen perencanaan sesuai pedoman c = Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	$= \frac{a + b + c}{3}$	Bappedalitbang
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan Inovasi > 90	Indikator ini menggambarkan peningkatan inovasi yang dilakukan oleh kabupaten	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan Inovasi > 90	Bappedalitbang

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Perangkat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih



dan Baik (*Clean and Good Goveernance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku”.

Sei Rampah, 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

RUSMIANI FURBA, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005